

**ANALISIS ATAS DATA KEUANGAN DALAM PENGGALIAN  
POTENSI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MOHAMAD FIRDAUS  
NIM : 058330013**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

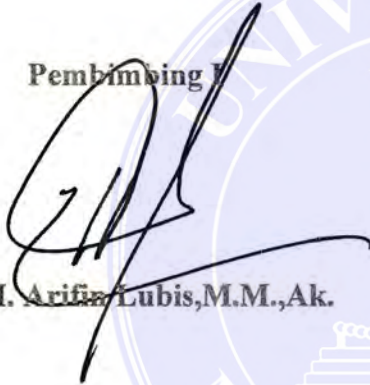
Document Accepted 20/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul : Analisis atas Data Keuangan Dalam Penggalian Potensi  
Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Banda Aceh  
Nama : Mohamad Firdaus  
No. Stambuk : 058330013  
Jurusan : Akuntansi

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Drs. H. Arifin Lubis, M.M., Ak.

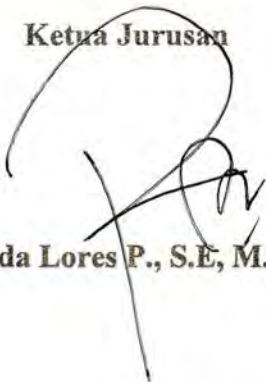
Pembimbing II



Dra. Rosmaini, M.M., Ak.

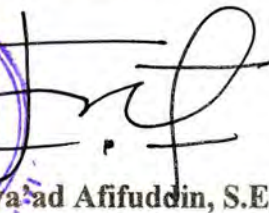
Mengetahui :

Ketua Jurusan



Linda Lores P., S.E, M.Si.

Dekan



Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, S.E, M.Ec

UNIVERSITAS MEDAN AREA Regal Lulus : Juni 2012

## Abstrak

Mohamad Firdaus, Analisis atas Data Keuangan dalam Penggalan Potensi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, dibawah bimbingan Drs. Arifin Lubis,M.M.,Ak sebagai Pembimbing I dan Dra. Rosmaini,M.M.,Ak sebagai Pembimbing II.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*, yang menuntut peran dominan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, memperhitungkan, menyetorkan serta melaporkan pajak yang terhutang sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-undang tersebut Direktorat Jenderal Pajak berperan untuk melakukan pelayanan, pembinaan, pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang sehingga hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terlaksana dengan optimal.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak menugaskan *account representative* untuk membuat profil wajib pajak sebagai bahan analisis potensi pajak yang masih dapat digali dan direalisasikan dalam bentuk pembayaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui pemberian kuisisioner dan analisis terhadap data keuangan wajib pajak yang terhimpun di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, diperoleh hasil bahwa terdapat potensi yang cukup besar yang masih dapat digali melalui analisis data keuangan wajib pajak yang ada. Namun jumlah potensi yang dapat direalisasikan dalam bentuk setoran pajak masih jauh dari potensi yang ada.

Kata kunci yang digunakan adalah analisis, potensi pajak, pembayaran pajak.



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian dan Fungsi Analisis Laporan Keuangan .....	5
B. Pengertian dan Fungsi Profil Wajib Pajak .....	8
C. Penggalian Potensi Wajib Pajak .....	18
D. Kerangka Konseptual .....	20
E. Hipotesis .....	21

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
B. Populasi dan Sampel .....	23
C. Definisi Operasional.....	23
D. Jenis dan Sumber Data .....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
F. Teknik Analisis Data .....	25

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil .....	27
B. Pembahasan .....	35

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	64
---------------------	----

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban warga negara yang diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi: “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Sehingga, kewajiban untuk membayar pajak sebenarnya sudah ditetapkan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Namun, perjalanan sejarah Indonesia yang cukup lama berada dalam lingkungan penindasan oleh penjajah yang menerapkan pajak sangat tinggi terhadap rakyat Indonesia membuat trauma tersendiri terhadap terminologi pajak. Efek trauma ini didukung dengan keadaan negara yang sedang mengalami pergolakan dalam mempertahankan kemerdekaan dan revolusi pemerintahan yang cukup lama di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada awal era pemerintahan Presiden Soeharto, perang antara negara-negara Arab melawan Israel pada tahun 1970-an mengakibatkan harga minyak dunia melambung. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk meletakkan tumpuan APBN pada ekspor minyak dan gas bumi.

Pada awal tahun 1980-an perang Arab-Israel telah berakhir dan berakibat pada turunnya harga minyak dunia. Hal tersebut memaksa pemerintah untuk mencari sumber pendanaan APBN alternatif yang mandiri, sehingga dimulailah untuk melakukan reformasi sistem perpajakan yang ada melalui paket Undang-

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dikeluarkan pada tahun 1983 yang meliputi Undang-



undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang nomor 8 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Sistem perpajakan lama yang menggunakan *official assesement* diubah menjadi sistem *self assesement* yang berimplikasi pada peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya kepada negara. Hal ini juga menuntut peran aktif para petugas di jajaran Direktorat Jenderal Pajak untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, membina dan sekaligus mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang ada.

Tuntutan kemandirian atas APBN menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara, sehingga peran pajak menjadi signifikan. Hal tersebut menuntut adanya peningkatan kinerja dan perbaikan sistem dalam pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak serta penggalian potensi perpajakan yang ada. Departemen Keuangan Republik Indonesia khususnya di Direktorat Jenderal Pajak secara umum telah mencanangkan modernisasi birokrasi untuk mencapai efektivitas serta efisiensi yang tinggi dalam kerjanya serta sekaligus memeberikan pelayanan prima. Salah satu terobosan yang digunakan adalah pengenalan dan pendekatan langsung terhadap wajib pajak melalui pembuatan profil wajib pajak.

Berdasarkan profil wajib pajak yang ada, Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisis yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai instrumen penilaian dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana diamankan dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas maka skripsi ini mengambil topik **“Analisis atas Data Keuangan Dalam Penggalian Potensi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah analisis data keuangan wajib pajak dapat mencerminkan potensi pajaknya?
2. Teknik analisis data keuangan seperti apakah yang diperlukan untuk melakukan penggalian potensi pajak secara umum?
3. Apakah terdapat pengaruh berupa kenaikan realisasi pembayaran pajak atas wajib pajak yang data keuangannya dianalisis dan diketahui potensi pajaknya?

Dalam hal ini, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut pada wajib pajak badan oleh karena wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk melampirkan laporan keuangannya pada surat pemberitahuan tahunannya.



Penulis juga membatasi analisis data keuangan yang akan diteliti adalah data keuangan wajib pajak untuk tahun 2008 dan 2009.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana memperoleh data potensi pembayaran pajak yang masih dapat direalisasikan dalam bentuk pembayaran pajak.
2. Untuk mengetahui teknik dan analisis apa yang dapat digunakan untuk menggali potensi wajib pajak.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh hasil analisis data keuangan wajib pajak dengan peningkatan pembayaran pajak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui model analisis atas data keuangan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai instrumen penggalan potensi pajak.
2. Sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus, dalam melakukan optimalisasi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.
3. Sebagai bahan kajian ilmiah dalam dunia pendidikan, khususnya bidang akuntansi perpajakan.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian dan Fungsi Analisis Laporan Keuangan

Akuntansi adalah seni daripada pencatatan, penggolongan dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidaknya-tidaknya seagian bersifat keuangan dengan cara setepat-tepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. (Munawir, S, 2004: 5)

Produk dari akuntansi salah satunya adalah tersajinya laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan.

Tujuan dari pelaporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Selain dari tujuan tersebut, pelaporan keuangan juga dapat digunakan untuk menaksir prospek arus kas, mengetahui kondisi keuangan, pencapaian prestasi dalam bentuk laba, dan bagaimana dana diperoleh dan digunakan oleh entitas usaha dalam mencapai tujuannya (Smith-Skousen, 1998: 5).

Menurut Munawir, dalam Analisa Laporan Keuangan (2004: 2) dikatakan bahwa “laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Triyono Utomo (2004: 5), “pelaporan keuangan bukanlah tujuan akhir dari akuntansi keuangan, melainkan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan usaha dan ekonomi.” Dengan demikian, untuk bisa memanfaatkan informasi yang terkandung dalam



laporan keuangan perlu dilakukan suatu tahap yaitu analisis atau intepretasi laporan keuangan.

Interpretasi atau analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi penganalisis untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demikian, interpretasi atau analisis laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting artinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan meskipun kepentingan mereka tidak selalu sama.

Analisis laporan keuangan merupakan penelaahan tentang hubungan-hubungan dan kecenderungan atau *trend* untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu atau diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain.

Menurut Munawir. S. dalam Analisa Laporan Keuangan (2004: 36), teknik analisis yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan :
  - a. data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah.

UNIVERSITAS MEDAN  
DAN NEARIKAN atau penurunan dalam jumlah rupiah.



- c. kenaikan atau penurunan dalam persentase.
  - d. perbandingan yang dinyatakan dengan rasio.
  - e. persentase dari total.
2. *Trend percentage analysis* adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui trend atas kondisi keuangannya, yaitu naik, tetap atau turun.
  3. *Common size statement* adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivasnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi pembiayaan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
  4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
  5. *Cashflow statement analysis* adalah suatu metode analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan kas selama periode tertentu.
  6. Analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

7. *Gross profit analysis* adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode atau perubahan laba kotor terhadap rencana anggaran yang ditetapkan pada periode yang sama.
8. *Break event point analysis* adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

Menurut Pardiati, dalam Analisis Laporan Keuangan (2008: 2), analisis laporan keuangan bagi *account representative* seyogyanya analisis laporan keuangan komersial dan analisis laporan keuangan fiskal yang ditujukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan wajib pajak, untuk menilai ada atau tidaknya rekayasa laporan keuangan atau rekayasa pengisian SPT

## **B. Pengertian dan Fungsi Profil Wajib Pajak**

Menurut Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-142/PJ/2008 tentang Panduan Pembuatan Profil Wajib Pajak Badan, “profil wajib pajak adalah informasi mengenai wajib pajak yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat aktivitas perpajakannya secara berkesinambungan yang diklasifikasikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 UNIVERSITAS MEDAN AREA kumulatif dan data lain.”

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)20/2/24

Tujuan pembuatan profil wajib pajak adalah untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan terutama untuk bahan analisis, mengukur tingkat risiko dan kepatuhan wajib pajak serta untuk lebih mengenal wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak dan dapat memonitor perkembangan usaha wajib pajak, melakukan pengawasan, penggalian potensi serta pelayanan yang lebih baik.

Profil wajib pajak antara lain harus memuat :

### **1. Data permanen**

Data Permanen adalah data yang menjelaskan keberadaan wajib pajak, di mana data dan informasinya cenderung tetap, apabila ada perubahan hanya sewaktu-waktu atau keadaan tertentu saja.

Data permanen dikelompokkan menjadi : identitas Wajib Pajak, organisasi, data ekonomi, keterkaitan dengan pihak ketiga dan kewajiban perpajakan.

#### **a. Identitas Wajib Pajak**

Identitas wajib pajak berfungsi untuk mengetahui siapa wajib pajak, kapan memulai kegiatan usahanya dan bagaimana prospek usahanya.

#### **b. Organisasi**

Organisasi berfungsi untuk mengetahui keberadaan, luasnya kegiatan usaha wajib pajak serta kewenangan dari setiap unit organisasi. Informasi ini terdiri dari struktur organisasi, stuktur modal, pengurus dan pemegang saham dan pohon kepemilikan.



- 1) struktur organisasi adalah bagan yang berguna untuk mengetahui kewenangan setiap unit organisasi.
- 2) stuktur modal, berguna untuk mengetahui kekuatan/besarnya perusahaan serta prospek usahanya.
- 3) pengurus dan pemegang saham Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab menjalankan usaha perusahaan dan siapa pemilik perusahaan.
- 4) pohon kepemilikan berfungsi untuk mengetahui siapa pemilik dan atau pengendali perusahaan baik langsung maupun tidak langsung serta untuk mendeteksi adanya transaksi hubungan istimewa.

#### c. Data Ekonomi

Data ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan usaha yang dilakukan, proses produksinya maupun kapasitas produksi sehingga dapat memberi indikasi mengenai besaran produksinya.

Data ekonomi terdiri atas kegiatan usaha, flow chart/alur produksi/usaha, bahan baku (input), hasil produksi (output), tenaga kerja dan kapasitas produksi/kegiatan.

- 1) kegiatan usaha, memberikan informasi atas gambaran umum, sejarah berdirinya perusahaan, kegiatan, lokasi

- usaha, dan tujuan didirikannya usaha sehingga diperoleh pemahaman mengenai usaha yang dilakukan wajib pajak
- 2) flow chart/alur produksi/usaha, berguna untuk mengetahui alur kegiatan/produksi wajib pajak dari awal kegiatan (bahan baku) hingga akhir kegiatan (barang jadi) sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dalam setiap alur kegiatan tersebut.
  - 3) bahan baku (*input*), untuk mengetahui apa dan spesifikasi *input* (termasuk misalnya luas lahan/tanah) dalam proses menghasilkan produk serta biaya dan kredit pajak atas *input* tersebut serta kewajiban *withholding tax* atas *input* tersebut.
  - 4) hasil produksi (*output*), untuk mengetahui jenis dan spesifikasi produk yang dihasilkan sesuai dengan *input*/bahan baku
  - 5) tenaga kerja, berfungsi untuk mengetahui hubungan banyaknya jumlah pegawai dengan jumlah *output* dan mengetahui hubungan dengan pemotongan/pemungutan yang dilakukan wajib pajak terhadap upah/gaji dari tenaga kerja tersebut.
  - 6) kapasitas produksi/kegiatan, Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan jumlah *output*/produksi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

#### d. Keterkaitan Dengan Pihak Ketiga

Keterkaitan dengan pihak ketiga memberikan informasi atau siapa-siapa atau pihak-pihak yang bertransaksi dalam kegiatan usaha perusahaan.

Dalam hal ini, pihak ketiga terdiri atas *supplier* utama, *customer* utama, hubungan istimewa serta kreditur dan debitur.

- 1) *supplier* utama, adalah *supplier* yang berhubungan/bertransaksi dengan wajib pajak secara terus menerus (berkesinambungan) selama paling sedikit 2 tahun, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada hubungan istimewa dengan wajib pajak serta pertukaran data.
- 2) *customer* utama, adalah *customer* yang berhubungan/bertransaksi dengan wajib pajak secara terus menerus (berkesinambungan) selama paling sedikit 2 tahun hal ini bertujuan Untuk mengetahui apakah ada hubungan istimewa dengan wajib pajak serta pertukaran data.
- 3) hubungan istimewa, data ini berfungsi untuk mengetahui dengan pihak/perusahaan mana wajib pajak memiliki hubungan istimewa, untukantisipasi penilaian kewajaran transaksi yang dilakukan.



- 4) kreditur/debitur, adalah kreditur/debitur yang berhubungan/bertransaksi dengan wajib pajak secara terus menerus (berkesinambungan) selama paling sedikit 2 tahun.

#### e. Kewajiban Perpajakan

Untuk mengetahui jenis pajak apa saja kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak terkait dengan kegiatan usaha dan transaksi yang dilakukan

## 2. Data Akumulatif

Data akumulatif adalah data yang menjelaskan perkembangan usaha wajib pajak, yang pada dasarnya memuat data transaksi yang terakumulasi secara periodik.

Data akumulatif terdiri dari : data ekonomi, data lawan transaksi dan data riwayat perpajakan

- a. data ekonomi, adalah data yang menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi wajib pajak selama kurun waktu 5 tahun terakhir, hal ini tercermin pada :

- 1) Neraca Komparatif
- 2) Laporan Rugi-Laba Komparatif
- 3) Perkembangan Produksi

- b. Data lawan transaksi yaitu data yang menggambarkan perkembangan transaksi dengan pihak ketiga yang mendukung kegiatan usaha wajib pajak.

Data lawan transaksi terdiri atas:

- 1) Data Transaksi Komparatif *Supplier* yaitu untuk mengetahui jumlah dan nilai transaksi dengan *supplier* dalam kaitannya dengan biaya untuk *input* dan dengan pemotongan/pemungutan yang dilakukan terhadap *supplier* serta pertukaran datanya.
  - 2) Data Transaksi Komparatif Customer. Data ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan nilai transaksi dengan customer dalam kaitannya dengan omzet serta pertukaran datanya.
  - 3) Data Transaksi Hubungan Istimewa bermanfaat untuk mengetahui jumlah dan nilai transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang ada hubungan istimewa dalam rangka kewajaran transaksi tersebut.
- c. Data riwayat perpajakan yaitu data yang menggambarkan perkembangan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak selama lima tahun terakhir (untuk kewajiban masa hanya tahun terakhir).

Data riwayat perpajakan terdiri dari pelaporan pajak, ikhtisar pembayaran, riwayat pemeriksaan, ketetapan pajak, riwayat restitusi, tunggakan pajak, riwayat penagihan aktif, riwayat

keberatan dan banding, data pemotongan dan pemungutan serta data transaksi komparatif kreditur dan debitur.

Kegunaannya data ini untuk mengetahui apakah wajib pajak telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

### 3. Data Lainnya

Data lainnya adalah data dan informasi tambahan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan wajib pajak selain data permanen dan data akumulatif yang dianggap penting dalam pemenuhan kewajiban fiskal wajib pajak.

Data Lainnya terdiri dari data internal dan data eksternal

#### a. Data Internal

Data internal adalah data yang berkaitan dengan wajib pajak yang sumbernya diperoleh dari internal Direktorat Jenderal Pajak. Data ini terdiri atas :

- 1) Data PBB
- 2) Data Alat Keterangan
- 3) Data dari Program Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan

#### b. Data Eksternal

Data Eksternal adalah data yang berkaitan dengan wajib pajak yang sumbernya diperoleh dari luar Direktorat Jenderal Pajak. Data



eksternal terdiri dari media massa, instansi lain, asosiasi, profesi dan lainnya.

#### 4. Analisis

Dari data permanen, data akumulatif dan data lainnya dilakukan analisis untuk mengetahui kewajaran dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dapat menentukan tindak lanjut yang sesuai dalam rangka penggalian potensi fiskal, pengawasan dan pelayanan terhadap wajib pajak.

Adapun analisis yang dilakukan antara lain adalah :

a. Analisis yang berhubungan dengan omset.

Sasaran dari analisis ini adalah untuk menilai kewajaran omset yang dilaporkan wajib pajak antara lain dengan melakukan analisa vertikal maupun horisontal, membandingkan omset dengan tenaga kerja, omset dengan luas lahan dan sebagainya.

b. Analisis yang berhubungan dengan biaya.

Sasaran dari analisis ini adalah untuk menilai kewajaran pembebanan biaya yang dilaporkan wajib pajak antara lain dengan melakukan analisa vertikal dan horisontal atas laporan laba rugi

c. Analisis yang berhubungan dengan produksi .

Sasaran dari analisis ini adalah untuk menilai kewajaran produksi yang dilakukan wajib pajak terutama dikaitkan dengan kapasitas

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 UNIVERSITAS MEDAN AREA pajak tersebut.

d. Analisis yang berhubungan dengan laba.

Sasaran dari analisis ini adalah untuk menilai kewajaran tingkat laba yang dilaporkan wajib pajak misalnya analisa vertikal dan horisontal atas laporan laba rugi.

e. Analisis yang berhubungan dengan harga

Sasaran dari analisis ini adalah untuk menilai kewajaran harga jual yang dilaporkan wajib pajak misalnya harga yang timbul dari transaksi hubungan istimewa.

f. Analisis biaya terhadap pemotongan / pemungutan

Sasaran dari analisis ini adalah untuk mengetahui biaya yang timbul yang merupakan obyek pemotongan/pemungutan telah dipotong /dipungut pajaknya. Misalnya dengan melakukan equalisasi biaya pada SPT PPh Badan dengan obyek pemotongan/pemungutan yang dilaporkan pada SPT Masa PPh pasal 23/26.

g. Analisis output terhadap input

Sasaran dari analisis ini adalah untuk menilai kewajaran output bila dikaitkan dengan input yang digunakan dalam rangka untuk memperoleh penghasilan, misalnya membandingkan rasio output input terhadap rasio output input tahun sebelumnya

h. Equalisasi Omset PPh Badan terhadap Omset PPh

Sasaran dari analisis ini adalah untuk menilai kewajaran omset

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Analisis atas Data Keuangan dalam Penggalian Potensi Wajib dengan membandingkan omset yang

dilaporkan WP di SPT PPh Badan dengan yang dilaporkan di SPT PPN.

#### i. Analisis Potensi Pajak dan Benchmarking

Merupakan ikhtisar dari semua analisis yang telah dilakukan dan perbandingan antara kinerja keuangan serta pembayaran pajak yang dilaporkan wajib pajak dengan Benchmark di bidang usahanya.

Analisis dilakukan dengan berbagai metode, pendekatan, formula dan teknik-teknik lainnya yang pada akhirnya dapat diketahui kewajaran laporan wajib pajak dan potensi pajaknya.

#### 5. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dalam hal ini adalah langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan untuk menindak lanjuti hasil analisis, terutama untuk menggali potensi pajak yang belum terealisasi dan untuk pertukaran data dengan KPP lain

Tindak lanjut yang dilakukan terdiri atas perbaikan administrasi, pendekatan persuasif, enforcement, dan monitoring pertambahan pajak serta sunset policy.

### C. Penggalan Potensi Wajib Pajak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2008), “Penggalan adalah usaha mencari dan menemukan, sedangkan potensi adalah kemampuan yang mempunyai

kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya,”

Document Accepted 20/2/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Menurut definisi di atas, penggalian potensi pajak adalah serangkaian usaha untuk mencari dan menemukan objek dan subjek pajak yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan menjadi kontribusi pembayaran pajak.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Zulfikar Thahar dalam Dasar-Dasar Teknik Pemeriksaan Pajak (137: 2008) dikatakan bahwa, “Salah satu tugas dari *account representative* adalah membuat profil wajib pajak sebagai perwujudan dari *knowing your taxpayer*”

Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 98/KMK.01/2006, “*Account representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern.”

*Account Representative* mempunyai tugas:

1. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak;

2. bimbingan/hubungan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

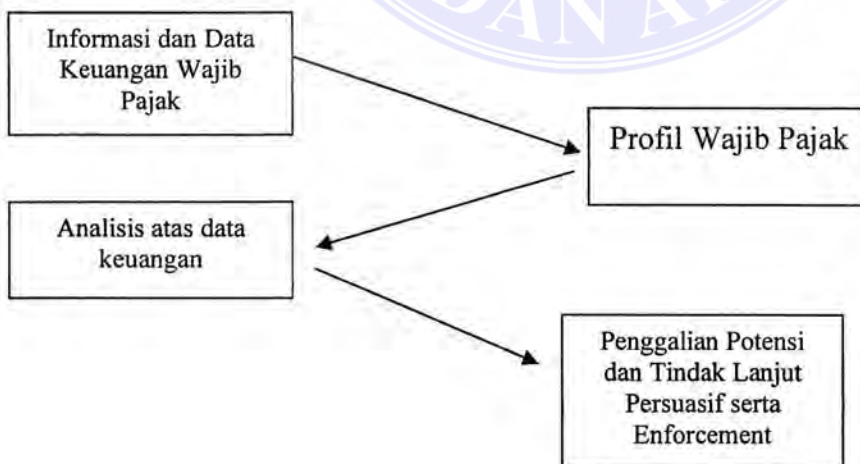
Access From (repository.uma.ac.id)20/2/24

3. penyusunan profil Wajib Pajak;
4. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi;

melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### D. Kerangka Konseptual

Informasi dan data keuangan wajib pajak yang dilaporkan dalam SPT dan lampirannya, data pembayaran pajak serta data lainnya yang dihimpun dan disusun dalam bentuk profil wajib pajak. Profil wajib pajak tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan analisis atas data-data laporan keuangan, SPT dan pembayaran pajak sehingga dapat diperoleh data potensi pembayaran pajak yang belum terealisasi. Potensi pajak tersebut akan direalisasikan dengan penerbitan surat himbauan untuk melakukan pembetulan SPT dan pembayaran atas pembetulan tersebut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya keterkaitan antara hasil analisis atas data keuangan wajib pajak terhadap potensi pajaknya sehingga analisis tersebut diperlukan dalam pembuatan profil wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
2. Dalam melakukan penggalian potensi, terdapat model analisis tertentu yang dapat mencerminkan potensi wajib pajak yang masih dapat direalisasikan dalam bentuk pembayaran pajak.
3. Dengan melakukan analisis atas data keuangan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengukur potensi wajib pajak dan melakukan pembinaan serta pengawasan secara lebih efektif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terutama pembayaran pajak.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mengumpulkan data supaya dapat menguji hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan mengenai keadaan / status dari subyek yang sedang dipelajari. Data deskriptif biasanya bersifat dokumentasi. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak dapat mengendalikan terhadap apa yang ada atau terjadi sekarang dan hanya mengukur saja terhadap apa yang sekarang telah ada.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Daud Beureueh Nomor 20 Banda Aceh.

#### 3. Waktu Penelitian

B. Tabel 1. Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Mar 2009	Apr 2009	Nov 2009	Des 2009	Jan 2010	Feb 2010	Mar 2010	Apr 2010	Mar 2012	Apr 2012
1	Pencarian Judul	■									
2	Pengajuan Judul										
3	Bimbingan Proposal		■	■	■	■	■				
4	Seminar Proposal						■				
5	Pengumpulan Data						■	■			
6	Pengolahan dan Analisis Data							■	■		
7	Bimbingan Skirpsi									■	
8	Penyusunan Skripsi										■
9	Sidang Meja Hijau										■

### C. Populasi dan Sampel

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “populasi adalah sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh data keuangan wajib badan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

Sedangkan sampel adalah bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel pada 31 wajib pajak badan yang mempunyai kontribusi signifikan dalam pembayaran pajak.

### D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis data keuangan adalah penelaahan tentang hubungan-hubungan dan kecenderungan atau *trend* untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, analisis atas data keuangan adalah sebagai variabel bebas, yaitu sebagai variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain dan merupakan faktor penyebab yang dapat mempengaruhi variabel yang lain.
2. Penggalan potensi pajak adalah serangkaian usaha untuk mencari

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan mencantumkan objek dan subjek pajak yang mempunyai

kemungkinan untuk dikembangkan menjadi kontribusi pembayaran pajak. Dalam hal ini, penggalan potensi adalah variabel tidak bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

3. Profil wajib pajak adalah informasi mengenai wajib pajak yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat aktivitas perpajakannya secara berkesinambungan yang diklasifikasikan atas data permanen, data akumulatif dan data lain.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

1. Data kuantitatif, yang merupakan data yang biasa diukur seperti laporan keuangan wajib pajak yang meliputi neraca dan laporan laba rugi selama 2 tahun yaitu tahun 2008 – 2009.
2. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data dari wajib pajak dan laporan keuangan tahunan wajib pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Usaha yang dilakukan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan Studi Lapangan yaitu suatu tehnik untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek tempat penelitian dengan cara dokumentasi. Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membuat catatan data-data perusahaan yang berkaitan dengan penelitian.



## G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dan dilakukan pengujian, atas hipotesis yang telah dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Dalam melakukan pengujian tersebut, penulis melakukan pengukuran atas variabel yang ada.

Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan realitas yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya melalui data yang diperoleh dari kuesioner dan dilakukan dengan menggunakan metode Persentase **Champion** untuk membuktikan hipotesis yaitu adanya keterkaitan antara hasil analisis atas data keuangan wajib pajak terhadap potensi pajaknya.

Metode Persentase **Champion** tersebut dilakukan dengan menghitung persentase jawaban “ya” terhadap jumlah jawaban pada kuisisioner. Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang harus diisi dan dijawab oleh responden sebagai objek penelitian. Untuk menguji anggapan dasar yang bersifat sementara, maka dapat diambil kesimpulan statistik mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.

Tahap-tahap dalam analisis data statistik :

1. Memisahkan jawaban responden sesuai dengan jawaban “ya” dan “tidak”
2. Menjumlahkan jawaban “ya” dan “tidak” sehingga dapat diketahui berapa masing-masingnya.
3. Semua jawaban ya dibagi dengan seluruh jawaban kemudian dikalikan

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jawaban "ya"}}{\sum \text{Jawaban Kuisisioner}} \times 100\%$$

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara penghitungan di atas berguna untuk mengembangkan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan Champion (1990: 102) yang mengklasifikasikan sebagai berikut :

*“The followig cycle guide may be used to asset the general strength of association coefficients”:*

*0.00 – 0.25 = No association or low association (weak association)*

*0.26 – 0.50 = Moderately low association (moderately weak association)*

*0.51 – 0.75 = Moderately high association (moderately strong association)*

*0.76 – 1.00 = High association (strong association)*

Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa :

1. 0% - 25% = Analisis Data Keuangan tidak berperan dalam usaha penggalian potensi wajib pajak
2. 26% - 50% = Analisis Data Keuangan sedikit berperan dalam usaha penggalian potensi wajib pajak
3. 51% - 75% = Analisis Data Keuangan cukup berperan dalam usaha penggalian potensi wajib pajak
4. 75% - 100% = Analisis Data Keuangan sangat berperan dalam usaha penggalian potensi wajib pajak

Metode ini telah digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Peranan Analisis Laporan Keuangan dalam Efektivitas Penilaian Permohonan Kredit pada Bank

Perkreditan Rakyat X Bandung, yang disusun oleh Andre Yulianto Herianto, UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama tahun 2006.

Document Accepted 20/2/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, mengenai Peranan Analisis atas Data Keuangan Wajib Pajak pada Penggalan Potensi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Proses analisis atas data keuangan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh telah dilaksanakan dengan cukup memadai. Hal ini didukung oleh adanya program pembuatan profile wajib pajak atas 1000 wajib pajak yang memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak di lingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh dan tindak lanjutnya berupa himbauan kepada wajib pajak atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Himbauan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut merupakan hasil dari analisis atas data-data keuangan wajib pajak yang dihimpun dan diolah oleh *account representative*.
2. Himbauan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah diterbitkan oleh *account representative* tersebut harus ditindaklanjuti berupa perbaikan data, berupa pembetulan surat pemberitahuan dan konsekuensinya berupa pembayaran pajak jika ternyata masih ada potensi pajak yang kurang dibayar. Selain perbaikan data berupa pembetulan surat pemberitahuan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Berkas: JMEDANAREA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA adalah konseling atas wajib pajak jika wajib pajak masih



tidak dapat memberikan klarifikasi data dan tidak bersedia melakukan perbaikan data melalui pembetulan SPT. Akhirnya, jika wajib pajak tidak juga memberikan penjelasan dan perbaikan data, *account representative* membuat usulan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis data dan potensi pajak yang masih tidak tergalai dengan proses himbauan dan konseling sebagai tindakan penegakan hukum yang pada akhirnya mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan tindakan penagihan aktif.

3. Analisis atas data keuangan wajib pajak tersebut meliputi data pembayaran pajak melalui Modul Penerimaan Negara, penyampaian surat pemberitahuan masa dan tahunan, penerbitan faktur pajak dan bukti potong oleh wajib pajak, laporan keuangan, data yang diproduksi melalui alat keterangan baik dari hasil pemeriksaan lapangan atau dari lawan transaksi wajib pajak, data lapangan melalui kunjungan *account representative* dalam rangka pembinaan dan pengawasan wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya dan data lain dari pihak eksternal seperti data kepemilikan kendaraan bermotor dari Samsat, dan data lainnya.
4. Berdasarkan penelitian, analisis yang digunakan untuk melakukan penggalian potensi perpajakan terdiri atas analisis perbandingan laporan keuangan baik laporan keuangan untuk periode yang berurutan maupun dengan kriteria usaha sejenis untuk dapat menilai kewajarannya secara umum, analisis trend untuk menilai perkembangan usaha wajib pajak dan peningkatan penerimaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dari sektor unggulan dalam mencapai target penerimaan pajak.

5. Analisis atas data keuangan wajib pajak yang dilakukan oleh *account representative* cukup banyak tergantung pada jenis usaha wajib pajak, proses bisnis, dan aspek-aspek perpajakannya.
6. Analisis atas data keuangan wajib pajak merupakan sarana untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan atas wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dengan pengawasan dan pembimbingan tersebut, diharapkan wajib pajak meningkatkan kepatuhannya dan berimplikasi pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.
7. Analisis-analisis yang digunakan untuk menggali potensi pajak tersebut tidak dapat serta merta menjadi dasar penetapan pajak terutang bagi wajib pajak, namun sebagai bahan untuk melakukan penggalian potansi wajib pajak dan instrumen untuk menilai kepatuhan secara material dan perlu adanya penelitian dan penelaahan lebih lanjut melalui proses pemeriksaan.
8. Potensi-potensi pembayaran pajak yang telah digali oleh *account representative* melalui analisis data wajib pajak tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh secara langsung terhadap setoran wajib pajak.

## B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan mencoba untuk memberikan saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas analisis laporan keuangan dan penggalian potensi pajak yang ada di Kantor

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Pelayanan Pajak Pada Kantor Bea Cukai Aceh sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)20/2/24



1. Adanya penggolongan pengawasan wajib pajak sesuai dengan proses bisnisnya. Dengan proses bisnis yang sama tentunya wajib pajak memiliki aspek perpajakan yang juga relatif sama, sehingga mempermudah pengawasan dan penggalian potensi pajaknya.
2. Adanya evaluasi efektivitas pelaksanaan analisis laporan keuangan yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai berupa peningkatan setoran pajak. Hal ini untuk efisiensi pelaksanaan analisis yang tidak memberikan kontribusi, oleh karena jumlah wajib pajak yang harus dimonitor dan dibina oleh seorang *account representative* sangat banyak.
3. Perlunya adanya standar analisis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar menjadi pedoman dalam penggalian potensi pajak untuk masing-masing jenis usaha dan proses bisnis wajib pajak dan bukan hanya didasarkan dengan adanya benchmarking semata yang masih sangat kurang memadai. Hal ini perlu disadari bahwa proses bisnis dan jenis usaha yang dilakukan oleh wajib pajak sangat variatif dan masing-masing mempunyai karakteristik transaksi dan aspek pajak yang berbeda.
4. Untuk mendukung validitas atas analisis data keuangan yang dilakukan oleh *account representative* dalam penggalian potensi wajib pajak, perlu adanya penyediaan bank data atas seluruh proses transaksi wajib pajak dengan berbagai pihak.



5. *Account representative* sebagai subjek dalam melakukan tugas pengawasan dan pembinaan wajib pajak harus mempunyai kualifikasi yang handal agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Untuk itu, perlu adanya pelatihan-pelatihan teknis dalam analisis data-data keuangan terutama laporan keuangan wajib pajak secara berkala dalam rangka penggalian potensi dan pembinaan wajib pajak.
6. Untuk mendukung adanya validitas atas analisis data keuangan wajib pajak, perlu adanya forum untuk para *account representative* dalam melakukan pengujian analisis untuk mendapatkan pendapat lain atas sebuah dan atau beberapa jenis transaksi dan data wajib pajak.
7. Perlu adanya penambahan jumlah sumber daya manusia untuk melakukan tugas pengawasan dan penggalian potensi serta pembinaan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh oleh karena jumlah wajib pajaknya sangat banyak sedangkan jumlah *account representative* hanya sepuluh orang untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan wajib pajak yang jumlahnya ribuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Champion, Dean. J., 1990, **Basic Statistic for Social Research**, Second edition, Mac Publishing Co, New York
- Kamus Besar Bahasa Indonesia**, 2008, <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>
- Munawir, S, 2004, **Analisa Laporan Keuangan**, Liberty, Yogyakarta
- Nazir, Mohamad, 2003, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pardiat, 2008, **Analisis Laporan Keuangan**, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta
- Smith, Jay M dan K. Fred Skousen, 1998, **Intermediate Accounting**, South-Western College Publishing, Ohio
- Teknik Pembuatan Profil Wajib Pajak**, 2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta
- Thahar, Zulfikar, 2008, **Dasar-Dasar Teknik Pemeriksaan Pajak**, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta
- Utomo, Triono, 2004, **Kajian Ekonomi Keuangan**, Volume 8, Nomor 4, Desember 2004
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 **tentang Ketentuan umum dan Tatacara Perpajakan**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 **tentang Pajak Penghasilan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 **tentang Pajak Pertambahan Nilai**
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang **Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern,**

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-142/PJ./2008, **tentang Panduan Pembuatan Profile Wajib Pajak Badan**, Jakarta

Siregar, Retnawati, 2008, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan

